

Bupati Minta Tim Bertindak

■ Pemkab Terganjil Aset dan Bansos

SANGGAU, TRIBUN - Bupati Sanggau, Ir Setiman H Sudin, mengungkapkan, masalah aset dan laporan dana bansos Rp 1,4 miliar menjadi penghambat bagi Pemkab Sanggau untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Masalah ini makin berlaut lantaran BPK telah mengeluarkan hasil audit opini berupa wajar dengan pengecualian (WDP) pada tahun ini.

Untuk menuntaskan kedua masalah tersebut, Bupati Setiman telah membentuk dua tim untuk melakukan penarikan aset dan pendataan bansos yang tak memiliki Surat pertanggungjawaban (SPJ). Namun sejauh ini belum ada titik terang dari tim.

"Saya sudah perintahkan tim yang dibentuk segera bertindak, mereka harus jemput bola melakukan pendataan. Kalau perlu sampai ke desa-desa, tim harus turun agar jelas mana saja aset kita dan siapa yang belum membuat SPJ bansos," tandas Setiman di sekitar gedung DPRD Sanggau, Senin (18/7).

Dikatakannya, jika semua usaha dilakukan gagal barulah akan diumumkan secara terbuka di media massa, lembaga mana saja yang telah menerima bansos dan aset. Karena, menurutnya, ada oknum PNS Pemkab yang tersandung masalah ini.

Namun Bupati optimistis kedua masalah tersebut dapat diselesaikan. Walau pun tidak selesai pada 2011, maksimal sudah rampung ketika nanti dirinya melepas jabatan bupati pada tahun 2013.

"Kalau tidak kita selesaikan, efeknya akan sangat panjang. Bahkan kita bisa dipidanakan lantaran dinilai telah merugikan negara. Khususnya untuk bansos, meski pun ini persoalan tahun 2006 namun kita harus tetap menyelesaikannya dengan kepala dingin," terang Setiman.

Khusus untuk penataan aset, dikatakan Setiman, dirinya berpesan kepada seluruh PNS dan mantan PNS serta mantan pejabat untuk secara sadar mengembalikan aset yang di-



TRIBUNSBS

“Kalau tidak kita selesaikan, efeknya akan sangat panjang. Bahkan kita bisa dipidanakan lantaran dinilai telah merugikan negara.”

Ir SETIMAN H SUDIN
Bupati Sanggau

pinjamkan kepadanya. Agar aset tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

"Jangan merasa aset yang mereka bawa tersebut sudah menjadi milik pribadi. Itu milik negara. Kalaupun dilakukan dum, harus jelas pembayarannya seperti apa," tukas Setiman.

Harus Tegas

Ketua DPRD Sanggau, Andreas Nyas, menyatakan, masalah aset ini menjadi persoalan pelik di banyak daerah, bukan hanya di Sanggau. Predikat opini WDP audit BPK RI, juga terjadi di banyak kabupaten di Indonesia.

"Hal ini karena tingkat kesadaran pejabat dan mantan pejabat kita masih terbilang sama. Kuncinya Pemkab kita minta tegas, kalau perlu mobil seperti yang ada di Sekadau segera dilakukan penarikan jika dum-nya tidak jelas," tan-

dasnya.

Andreas juga meminta Pemkab segera mendata aset sesegera mungkin, apa yang masih tampak sekarang. Karena akan terus mengalami penumpukan jika tidak diselesai-

kan, sehingga berimbas pada opini dari BPK yang tidak mengalami perubahan secara terus menerus.

"Terkait bansos saya tidak bisa banyak berkomentar karena saya belum tahu rinciannya. Sebaiknya setiap tahun Pemkab menetapkan lembaga sosial mana saja yang akan mendapatkan bantuan sosial, hingga akhir tahun anggarannya jelas, siapa yang sudah membuat SPJ dan yang belum. Hal ini selalu kita sampaikan kepada bupati sejak beberapa tahun terakhir," pungkas Andreas. (sbs)

Opini WDP Kabupaten Sanggau

- Hasil audit BPK RI 2011
- Dua temuan bansos Rp 1,4 miliar dan penataan aset yang lamban
- Pemkab terancam dipidanakan

Upaya Pemkab Sanggau

- Membentuk dua tim tangani bansos dan aset
- Konsultasi dengan BPK terkait langkah selanjutnya.
- Akan mengumumkan di media (terkait aset)
- Umumkan lembaga mana yang menerima bansos

Tim Bentukan Bupati

- Tim dari Sekda Sanggau
- Tim Inspektorat,
- Tim dari DPKKD Sanggau



GRAFIK: DIKA, DATA: SBS
Sumber: Bupati Sanggau/Ketua DPRD



news analysis

Andriyus Wijaya SE Pemerhati Kebijakan Publik

Tidak Profesional

SEBUAH pemerintahan layaknya Pemkab Sanggau merupakan organisasi besar yang terdiri dari bidang-bidang dan dinas-dinas. Masing-masing bidang dan dinas memiliki pekerjaannya sendiri-sendiri, sesuai dengan yang ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur terkait otonomi daerah.

Dengan kondisi tersebut sebenarnya sudah menjadi jelas duduk permasalahannya. Pemkab memiliki Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) yang mestinya bertugas dalam hal penataan aset. Dinas ini harus bekerja sesuai dengan tugasnya, permasalahan akan menjadi sangat rumit jika dinas yang sudah ditunjuk tidak bekerja secara profesional.

Sebuah organisasi yang kecil sekalipun seperti halnya partai politik atau bahkan lingkungan keluarga, jika tidak dijalankan secara profesional maka akan stagnan dalam peker-

jaanya. Faktor yang berikut tentunya keberanian seorang pemimpin dalam melakukan penertiban aset ini, bupati dalam hal ini tidak boleh ragu untuk menarik aset agar tidak disalahgunakan.

Hanya saja jika semua elemen baik dinas yang sudah diberikan tugas untuk melakukan pendataan sudah merasa nyaman dengan kondisi sekarang. Maka masalah akan terus berlanjut pada pemerintahan yang akan datang.

Pada hal untuk hal pendataan aset ini Pemkab sudah bekerjasama dengan pihak ketiga, namun kita tidak tahu secara persis seperti apa progres pekerjaannya. Sehingga tahun ini Sanggau kembali mendapatkan predikat yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, meskipun pada tahun 2006 kita pernah meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (sbs)